

**TINJAUAN *SIYĀSAH TANFĪẒIYYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
PADA LAYANAN AIR BERSIH OLEH PDAM
(Studi di Desa Hanau Brak Kecamatan Padang Cermin
Kabupaten Pesawaran)**

ARTIKEL ILMIAH

**ZAHROTUN ANNISA
NPM: 2221020438**



**Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H/2026 M**

**TINJAUAN *SIYĀSAH TANFĪẒIYYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
PADA LAYANAN AIR BERSIH OLEH PDAM**

(Studi di Desa Hanau Brak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten
Pesawaran)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Program Studi Hukum Tata
Negara

Oleh:

**Zahrotun Annisa
NPM. 2221020438**

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H
Pembimbing II : Nurasari, S.H., M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H/ 2026 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ة	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	ẓ	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik pada pelayanan air bersih oleh PDAM di Desa Hanau Brak, Kecamatan Padang Cermin, serta meninjaunya dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam peraturan daerah dengan kondisi empiris pelayanan air bersih di lapangan, seperti tidak stabilnya distribusi air, rendahnya debit air, serta belum optimalnya respons terhadap keluhan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik pada pelayanan air bersih oleh PDAM di Desa Hanau Brak serta menganalisis pelaksanaannya dalam perspektif *Siyāsah Tanfidziyyah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pemerintah desa, kepala dusun, dan masyarakat, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan induktif untuk menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan air bersih oleh PDAM di Desa Hanau Brak belum berjalan secara optimal. Permasalahan utama terletak pada infrastruktur yang tidak memadai, seperti jaringan pipa yang telah tua dan mengalami kebocoran, sehingga mengganggu kontinuitas dan pemerataan distribusi air. Selain itu, mekanisme pengaduan belum terintegrasi secara efektif, serta koordinasi antara pemerintah desa dan PDAM masih belum maksimal.

Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam pelayanan publik belum sepenuhnya terpenuhi. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan belum mampu menghadirkan pelayanan yang optimal sesuai dengan nilai-nilai syariat dan tujuan kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, PDAM, Perda Pesawaran, *Siyasah Tanfidziyyah*, Air Bersih.

ABSTRACT

This study examines the implementation of Regional Regulation of Pesawaran Regency Number 11 of 2015 concerning Public Services in the clean water supply provided by the Regional Water Supply Company (PDAM) in Hanau Brak Village, Padang Cermin District, and analyzes it from the perspective of Siyāsah Tanfidziyyah. This research is motivated by the existence of a gap between the normative provisions of the regional regulation and the empirical conditions of clean water services in the field, such as unstable water distribution, low water pressure, and suboptimal responses to community complaints.

This study aims to analyze the implementation of Pesawaran Regency Regional Regulation Number 11 of 2015 concerning Public Services in the provision of clean water services by the Regional Water Supply Company (PDAM) in Hanau Brak Village and to examine its implementation from the perspective of Siyāsah Tanfidziyyah. This study employs a qualitative approach with a field research design. Data were collected through observation, interviews with village officials, hamlet heads, and local residents, as well as documentation. The data analysis was conducted using a descriptive-analytical method with an inductive approach, drawing conclusions from specific facts found in the field. The findings show that the implementation of clean water services by PDAM in Hanau Brak Village has not been running optimally. The main problems lie in inadequate infrastructure, such as aging and leaking pipeline networks, which disrupt the continuity and equitable distribution of water. In addition, the complaint handling mechanism has not been effectively integrated, and coordination between the village government and PDAM remains suboptimal.

From the perspective of Siyāsah Tanfidziyyah, these conditions indicate that the principles of trustworthiness (amanah), justice ('adl), and public welfare (maslahah) in public services have not been fully realized. The government, as the policy implementer, has not been able to provide optimal services in accordance with Islamic values and the objectives of public welfare.

Keywords: *Public Service, PDAM, Pesawaran Regional Regulation, Siyāsah Tanfidziyyah, Clean Water*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahrotun Annisa

NPM : 2221020438

Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Menyatakan bahwa artikel ilmiah yang berjudul “*Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Publik Pada Layanan Air Bersih Oleh PDAM (Studi di Desa Hanau Brak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)*” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 08 Mei 2026.
Penulis,



Zahrotun Annisa
NPM. 2221020438



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Artikel : Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 11
Tahun 2015 Tentang Layanan Publik Pada Layanan Air
Bersih Oleh PDAM (Studi di Desa Hanau Brak Kecamatan
Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)

Nama : Zahrotun Annisa
NPM : 2221020438
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hi. Zuhraini, S.H., M.H.
NIP. 197403072000121002


Nurasari, S.H., M.H.
NIP. 2021120119961215035

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Tata Negara**


Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.
NIP. 197102082003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Artikel Ilmiah dengan judul **“Tinjauan Siyasaah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Layanan Publik Pada Layanan Air Bersih Oleh PDAM (Studi di Desa Hanau Brak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)”** disusun oleh, Zahrotun Annisa, NPM: 2221020438, Program Studi Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung hari/tanggal: Selasa, 14 Juli 2026

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. (.....)

Sekretaris : Syarif Bahaudin Mudore, S.Hum., M.A. (.....)

Penguji I : Prof. Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraiini, S.H., M.H. (.....)

Penguji III : Nurasari, S.H., M.H. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

(Q.S Annisa:58)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan bagi penulis untuk menyelesaikan artikel ilmiah ini. Dengan segenap rasa cinta dan kasih, penulis persembahkan Karya Artikel Ilmiah ini untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Rukmansyah dan Ibu Salamah, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, serta semangat tanpa henti kepada penulis. Terima kasih atas setiap perjuangan, kerja keras, dan cinta tulus yang selalu mengiringi langkah penulis hingga sampai pada tahap ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, serta keberkahan dalam setiap langkah Bapak dan Ibu. Aamiin.
2. Saudara kandung tercinta, Sri Wahyuni, beserta keluarga, yang selalu memberikan doa, perhatian, dukungan, dan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas segala bantuan, ketulusan, dan motivasi yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, kelancaran rezeki, dan keberkahan untuk kalian semua. Aamiin.
3. Almamater tercinta, UIN Raden Intan Lampung, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, pengalaman, dan membentuk perjalanan intelektual serta pribadi penulis. Terima kasih atas segala pembelajaran dan pengalaman berharga yang diberikan selama proses pendidikan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis Penulis bernama Zahrotun Annisa, lahir di Gebang pada tanggal 13 November 2004, penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Orang tua penulis bernama Rukmansyah dan Salamah. Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. SDN 5 Teluk Pandan, pada 2010-2016
2. SMPN 25 Pesawaran, pada tahun 2016-2019
3. SMK Jakarta Timur 1, pada tahun 2019-2022
4. Pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah.

Selama menjadi mahasiswi di Fakultas Syariah turut menjadi salah satu mahasiswi yang berkembang dibidang akademik maupun non akademik.

Bandar Lampung, 8 Mei 2026

Zahrotun Annisa
NPM. 2221020438

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur tidak hentinya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia tiada tara, kekuatan serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini dengan judul **“Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Publik Pada Layanan Air Bersih Oleh PDAM (Studi di Desa Hanau Brak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)”**

Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi agung yaitu Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat, dan pengikutnya semoga kita semua tergolong umatnya yang selalu mendapatkan syafa'atnya. Suatu keharusan bagi penulis untuk menyampaikan terimakasih sebagai rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian artikel ilmiah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph. D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. M. Yasir Fauzi, M.H Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).
4. Ibu Nur Rahmah, S.H.I, M.H. Selaku sekretaris prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).
5. Ibu Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dan Bapak Nurasari, S.H., M.H, S.H.I., M.H. Selaku Pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan artikel ilmiah ini.
6. Sivitas Akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung.
8. Kepada keluarga besar Bapak Sanusi (Alm) dan Ibu Satiah, terimakasih atas semua dukungan dan kebaikan kepada penulis

selama penulis menempuh perjalanan yang tidak mudah ini. Menjadi orang tua penulis selama penulis menempuh pendidikan, Semoga Allah SWT. Senantiasa melindungi seluruh anggota keluarga besar dan membalas semua kebaikan keluarga besar.

9. Sahabat dalam grup “CEWE BENER” penulis yaitu Liza Fuziah dan Alfina terima kasih telah menjadi rumah bagi penulis, senantiasa mendengarkan keluh kesah dan kebersamaan dalam ketidakmungkinan ini.
10. Seluruh teman-teman Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung angkatan 2022 terkhusus teman-teman HTN L.
11. Terakhir, penulis ingin menghadrkan apresiasi terdalam kepada diri sendiri, Zahrotun Annisa. Terima kasih telah bertahan di tengah lelah, memilih tetap melangkah saat ragu, dan memeluk diri sendiri ketika tidak ada tempat bersandar. Setiap proses yang dijalani bukanlah hal yang sia-sia. Semoga ke depan langkahmu dipenuhi ketenangan, keberanian, dan kasih sayang sebagai balasan atas segala usaha dan doa yang telah kau titipkan dalam perjalanan ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, maka dari itu kepada para pembaca agar kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang bersifat membangun, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 08 Mei 2026

Zahrotun Annisa
NPM. 2221020382

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
Abstrak.....	1
<i>Abstract</i>	2
A. PENDAHULUAN.....	3
B. METODE PENELITIAN	6
C. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	7
D. PENUTUP	17
DAFTAR PUSTAKA.....	20
LAMPIRAN	22

**TINJAUAN *SIYASAH TANFIDZIYYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
PADA LAYANAN AIR BERSIH OLEH PDAM
(Studi di Desa Hanau Brak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten
Pesawaran)**

Zahrotun Annisa, Zuhraini, Nurasari

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: annisazahrotun121@gmail.com, zuhraini@radenintan.ac.id,
nurasari@radenintan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik pada pelayanan air bersih oleh PDAM di Desa Hanau Brak, Kecamatan Padang Cermin, serta meninjaunya dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam peraturan daerah dengan kondisi empiris pelayanan air bersih di lapangan, seperti tidak stabilnya distribusi air, rendahnya debit air, serta belum optimalnya respons terhadap keluhan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik pada pelayanan air bersih oleh PDAM di Desa Hanau Brak serta menganalisis pelaksanaannya dalam perspektif *Siyāsah Tanfidziyyah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pemerintah desa, kepala dusun, dan masyarakat, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan induktif untuk menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan air bersih oleh PDAM di Desa Hanau Brak belum berjalan secara optimal. Permasalahan utama terletak pada infrastruktur yang tidak memadai, seperti jaringan pipa yang telah tua dan mengalami kebocoran, sehingga

mengganggu kontinuitas dan pemerataan distribusi air. Selain itu, mekanisme pengaduan belum terintegrasi secara efektif, serta koordinasi antara pemerintah desa dan PDAM masih belum maksimal. Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam pelayanan publik belum sepenuhnya terpenuhi. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan belum mampu menghadirkan pelayanan yang optimal sesuai dengan nilai-nilai syariat dan tujuan kemaslahatan masyarakat.

Kata kunci: Pelayanan Publik, PDAM, Perda Pesawaran, *Siyasah Tanfidziyyah*, Air Bersih.

Abstract

This study examines the implementation of Regional Regulation of Pesawaran Regency Number 11 of 2015 concerning Public Services in the clean water supply provided by the Regional Water Supply Company (PDAM) in Hanau Brak Village, Padang Cermin District, and analyzes it from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah. This research is motivated by the existence of a gap between the normative provisions of the regional regulation and the empirical conditions of clean water services in the field, such as unstable water distribution, low water pressure, and suboptimal responses to community complaints. This study aims to analyze the implementation of Pesawaran Regency Regional Regulation Number 11 of 2015 concerning Public Services in the provision of clean water services by the Regional Water Supply Company (PDAM) in Hanau Brak Village and to examine its implementation from the perspective of Siyāsah Tanfidziyyah. This study employs a qualitative approach with a field research design. Data were collected through observation, interviews with village officials, hamlet heads, and local residents, as well as documentation. The data analysis was conducted using a descriptive-analytical method with an inductive approach, drawing conclusions from specific facts found in the field. The findings show that the implementation of clean water services by PDAM in Hanau Brak Village has not been running optimally. The main problems lie in inadequate infrastructure, such as aging and leaking pipeline networks, which disrupt the continuity and equitable distribution of water. In

addition, the complaint handling mechanism has not been effectively integrated, and coordination between the village government and PDAM remains suboptimal. From the perspective of Siyasaah Tanfidziyyah, these conditions indicate that the principles of trustworthiness (amanah), justice ('adl), and public welfare (maslahah) in public services have not been fully realized. The government, as the policy implementer, has not been able to provide optimal services in accordance with Islamic values and the objectives of public welfare.

Keywords: *Public Service, PDAM, Pesawaran Regional Regulation, Siyasaah Tanfidziyyah, Clean Water*

A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Surya *et al.*, 2026). Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, termasuk penyediaan air bersih yang layak, berkelanjutan, dan merata (Gilang Romadon *et al.*, 2025). Air bersih memiliki peran penting tidak hanya dalam menunjang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dalam menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan, serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat (Putri *et al.*, 2022).

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar (basic needs) sekaligus hak setiap warga negara. Oleh karena itu, permasalahan pelayanan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bukan sekadar persoalan administratif, melainkan merupakan persoalan yang sangat vital karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup, kesehatan masyarakat, sanitasi lingkungan, dan aktivitas ekonomi. Bahkan, apabila pelayanan air bersih mengalami gangguan secara berkepanjangan, kondisi tersebut dapat berdampak fatal berupa meningkatnya risiko penyakit, terganggunya aktivitas masyarakat, hingga menurunnya kualitas hidup. Kualitas pelayanan air bersih menjadi bagian integral dari tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan publik yang optimal (Syahrian, 2023).

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Hutasuhut *et al.*, 2022). Kabupaten Pesawaran telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan layanan publik, termasuk pelayanan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Al Arif & Paramadina, 2021). Penelitian ini secara khusus berfokus pada implementasi Pasal 8 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 yang mengatur bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berdasarkan kepastian hukum. Asas tersebut menghendaki agar setiap penyelenggara pelayanan publik memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak masyarakat sebagai penerima layanan memperoleh kepastian, perlindungan, dan pelayanan yang berkualitas.

Peraturan ini menekankan prinsip-prinsip pelayanan publik seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan (Pratama dan Dewi, 2022). PDAM sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjamin kontinuitas, kualitas, dan pemerataan distribusi air bersih kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan (Hidayat & Niagara, 2022).

Implementasi kebijakan tersebut di lapangan belum sepenuhnya berjalan optimal. Di Desa Hanau Brak, Kecamatan Padang Cermin, pelayanan air bersih oleh PDAM masih menghadapi berbagai kendala, seperti distribusi air yang tidak lancar, kualitas air yang kurang memenuhi standar, serta minimnya respons terhadap keluhan masyarakat. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan air bersih masih belum mampu memenuhi hak dasar masyarakat secara optimal. Kondisi ini menjadi persoalan yang sangat serius karena keterlambatan maupun kegagalan pelayanan PDAM tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga berpotensi mengancam kesehatan masyarakat, menghambat aktivitas rumah tangga dan

perekonomian, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Pasal 8 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 belum terlaksana secara optimal, karena asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik belum sepenuhnya terwujud dalam pelayanan air bersih yang diterima masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam peraturan daerah dengan realitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Dalam perspektif hukum tata kelola pemerintahan, kegagalan penyediaan air bersih juga mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Oleh sebab itu, persoalan pelayanan PDAM tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan sebagai persoalan pelayanan publik yang bersifat strategis, vital, dan berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan *Siyāsah Tanfīdziyyah*, pelaksanaan kebijakan publik menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang amanah (Agamar *et al.*, 2026).

Siyāsah Tanfīdziyyah menekankan bahwa pemerintah tidak hanya berperan dalam merumuskan kebijakan, tetapi juga wajib memastikan implementasinya berjalan secara adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Marisa *et al.*, 2026). Dalam konteks pelayanan air bersih, pemerintah dan PDAM sebagai pelaksana kebijakan dituntut untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat sebagai bentuk realisasi amanah dan perlindungan terhadap kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Kegagalan dalam memberikan pelayanan publik yang optimal dapat dipandang sebagai bentuk ketidaksesuaian dalam menjalankan amanah pemerintahan (Aprelia *et al.*, 2023).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 8 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015

dalam pelayanan air bersih oleh PDAM di Desa Hanau Brak, serta meninjau pelaksanaannya dalam perspektif *Siyāsah Tanfīdziyyah*. Penelitian ini menjadi penting mengingat pelayanan air bersih merupakan sektor yang menyangkut kebutuhan primer masyarakat sehingga setiap kelemahan dalam implementasi kebijakan berpotensi menimbulkan dampak yang luas bagi kehidupan sosial, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang siyasah, serta memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi pelayanan air bersih oleh PDAM di Desa Hanau Brak, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, serta menelaahnya dalam perspektif *Siyāsah Tanfīdziyyah*. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan kondisi empiris di lapangan sekaligus menganalisisnya berdasarkan kerangka teori yang digunakan (Moleong, 2021).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari pihak PDAM, aparat desa, serta masyarakat sebagai pengguna layanan air bersih. Observasi lapangan juga dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan yang diberikan. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik, laporan PDAM, serta literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati kondisi nyata pelayanan air bersih, wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam

dari para informan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, laporan, dan dokumen pendukung lainnya (Sugiyono, 2022).

Teknik penentuan informan menggunakan metode teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus di lapangan menuju pemahaman yang lebih umum (Creswell & Creswell, 2023).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun metode, dengan cara membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Saldaña, 2021).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik pada Layanan Air Bersih oleh PDAM

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Hanau Brak, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik pada sektor pelayanan air bersih oleh PDAM belum berjalan secara optimal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 belum berjalan secara optimal. Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edward III, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Hasanah & Handayani, 2025). Dalam penelitian ini, rendahnya debit air dan kebocoran jaringan menunjukkan bahwa aspek sumber daya (*resources*) belum memadai. Lambatnya penanganan permasalahan jaringan utama mencerminkan belum optimalnya disposisi pelaksana serta koordinasi antarlembaga dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari aspek ketersediaan dan kontinuitas layanan, distribusi air bersih belum stabil. Air cenderung mengalir dengan debit yang cukup pada malam hari, sedangkan pada pagi hingga siang hari aliran air sering kali tidak tersedia di beberapa rumah warga. Kondisi ini sebagaimana wawancara dengan Bapak Ogi selaku Sekretaris Desa Hanau Brak yang menyatakan bahwa “air hanya mengalir dengan debit besar pada malam hari, sementara pada siang hari sering tidak mengalir ke beberapa rumah warga”. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kontinuitas pelayanan belum terpenuhi secara maksimal.

Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang mengharuskan setiap penyelenggara memberikan pelayanan secara berkesinambungan, dapat diakses oleh seluruh masyarakat, dan memenuhi standar pelayanan minimal. Ketidakstabilan distribusi air menunjukkan bahwa implementasi Perda belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Kondisi tersebut bertentangan dengan teori pelayanan publik yang menyatakan bahwa pelayanan harus memenuhi prinsip kontinuitas, kepastian, keadilan, dan responsivitas. Ketidakstabilan distribusi air menunjukkan bahwa standar pelayanan publik sebagaimana dijelaskan dalam teori tersebut belum terpenuhi secara optimal (Rajagukguk *et al.*, 2022).

Dari segi kualitas air, hasil wawancara dengan Bapak Hendri selaku masyarakat Desa Hanau Brak menunjukkan bahwa air yang disalurkan oleh PDAM relatif baik, jernih, dan layak digunakan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Air yang diterima tergolong bersih dan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kualitas yang baik tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan kuantitas atau debit air yang memadai.”

Permasalahan utama justru terletak pada kuantitas dan tekanan air yang rendah. Banyak masyarakat mengeluhkan

kecilnya debit air, yang menyebabkan kebutuhan air sehari-hari tidak terpenuhi secara optimal. Bahkan, penggunaan pompa air oleh sebagian warga memperparah ketimpangan distribusi, karena hanya rumah tangga tertentu yang dapat memperoleh aliran air secara maksimal. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam distribusi pelayanan.

Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari mutu air yang diterima masyarakat, tetapi juga dari kontinuitas, tekanan, dan pemerataan distribusinya. Dengan demikian, meskipun kualitas air tergolong baik, pelayanan tetap belum dapat dikatakan optimal apabila kuantitas air yang diterima masyarakat masih belum mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Dari aspek responsivitas pelayanan, ditemukan bahwa PDAM cukup cepat dalam menangani permasalahan teknis berskala kecil, seperti kerusakan pada sambungan rumah tangga. Namun, untuk permasalahan yang lebih besar, seperti kebocoran pada jaringan utama dan fasilitas sumber air, penanganannya masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas dan profesionalitas sebagaimana diatur dalam Perda.

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu faktor yang memengaruhi belum optimalnya pelayanan adalah kondisi jaringan distribusi. Perlu dipastikan kembali apakah telah dilakukan pembaruan atau penggantian jaringan pipa oleh PDAM. Apabila pembaruan telah dilakukan, maka persoalan pelayanan menunjukkan bahwa kendala tidak hanya disebabkan oleh kondisi pipa, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek manajemen distribusi, kapasitas jaringan, maupun sistem operasional pelayanan. Sebaliknya, apabila belum terdapat pembaruan jaringan pipa, maka kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab utama belum optimalnya implementasi pelayanan air bersih.

2. Peran Pemerintah Desa dan Mekanisme Pengaduan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pihak PDAM. Aparat desa tidak hanya menerima laporan, tetapi juga melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan, seperti kebocoran pipa dan gangguan distribusi air. Namun demikian, efektivitas peran tersebut masih terbatas karena tindak lanjut dari pihak PDAM terhadap laporan yang disampaikan belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erik selaku Staf Pelayanan Pelanggan PDAM Kabupaten Pesawaran, diketahui bahwa PDAM memiliki tugas untuk menyediakan pelayanan air bersih kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan yang diberikan meliputi penyediaan jaringan distribusi air bersih, pelayanan pemasangan sambungan baru, serta penanganan pengaduan pelanggan. PDAM juga menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat diakses masyarakat secara langsung maupun melalui petugas lapangan. Bapak Erik menjelaskan bahwa:

"PDAM berusaha memberikan pelayanan air bersih secara maksimal kepada masyarakat. Jika terdapat keluhan seperti air tidak mengalir, kebocoran pipa, atau kualitas air yang kurang baik, masyarakat dapat melapor kepada petugas dan akan segera ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PDAM telah berupaya menyediakan saluran komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan air bersih. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi kualitas pelayanan. Menurut Bapak Erik, keterbatasan jaringan pipa, kondisi geografis wilayah, serta gangguan teknis menjadi faktor yang sering

menghambat kelancaran distribusi air kepada pelanggan. Beliau menyampaikan bahwa:

"Kendala yang sering dihadapi adalah kerusakan jaringan pipa dan kondisi sumber air yang terkadang mengalami penurunan debit, terutama pada musim kemarau. Hal ini berpengaruh terhadap kelancaran distribusi air kepada pelanggan."

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pelayanan yang diharapkan (*service expectation*) dengan pelayanan yang diterima masyarakat (*service performance*). Dari sisi penyelenggara, pelayanan telah diupayakan sesuai prosedur, sedangkan dari sisi masyarakat, pelayanan dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan air secara optimal.

PDAM juga melakukan evaluasi secara berkala melalui monitoring lapangan dan penanganan laporan pelanggan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai permasalahan pelayanan masih dirasakan oleh masyarakat Desa Hanau Brak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Erlian selaku Kepala Dusun Hanau Brak yaitu:

"Masyarakat cenderung menyampaikan keluhan secara langsung kepada PDAM tanpa melalui pemerintah desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan belum terintegrasi secara sistematis antara pemerintah desa dan PDAM. Akibatnya, koordinasi dalam penanganan permasalahan pelayanan air bersih belum berjalan secara optimal."

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan belum menerapkan prinsip *collaborative governance*, yaitu sinergi antara pemerintah desa, PDAM, dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan pelayanan publik. Akibatnya, proses penyelesaian keluhan sering kali berjalan lambat dan tidak menghasilkan solusi yang berkelanjutan.

Tingginya intensitas keluhan masyarakat, terutama terkait kecilnya debit air, ketidakstabilan distribusi, serta

kualitas pelayanan yang dianggap belum memadai, menunjukkan bahwa pelayanan air bersih masih belum memenuhi harapan masyarakat. Kondisi ini diperkuat oleh adanya persepsi masyarakat mengenai ketidakseimbangan antara biaya yang dibayarkan dengan pelayanan yang diterima. Masyarakat merasa bahwa kewajiban pembayaran rekening air secara rutin belum diimbangi dengan kualitas pelayanan yang memuaskan, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dalam pelayanan publik.

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan perspektif antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Dari sisi PDAM, berbagai kendala teknis seperti kerusakan jaringan pipa, keterbatasan infrastruktur, dan penurunan debit sumber air menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas pelayanan. Sementara itu, dari sisi masyarakat, yang menjadi perhatian utama adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih secara lancar, merata, dan berkelanjutan. Perbedaan perspektif tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan koordinasi antara PDAM, pemerintah desa, dan masyarakat agar proses pelayanan serta penyelesaian pengaduan dapat berjalan lebih efektif.

Sistem pelayanan air bersih di Desa Hanau Brak belum sepenuhnya berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Padahal, dalam prinsip pelayanan publik, kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan tidak hanya pada aspek teknis pelayanan, tetapi juga pada aspek koordinasi kelembagaan, komunikasi, serta sistem pengaduan yang lebih responsif, transparan, dan terintegrasi agar pelayanan air bersih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

3. Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Pelayanan Publik pada Layanan Air Bersih oleh PDAM

Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan kebijakan publik secara efektif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan

masyarakat. Pelayanan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat termasuk dalam kategori pelayanan publik yang wajib dipenuhi oleh negara sebagai bentuk pelaksanaan amanah kekuasaan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS An-Nisa: 58).

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk amanah, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah, harus dilaksanakan secara adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari efektivitas implementasinya dalam memenuhi hak-hak masyarakat secara nyata.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Hanau Brak, implementasi pelayanan air bersih oleh PDAM menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip ideal *Siyasah Tanfidziyyah* dengan realitas empiris. Dari prinsip amanah, pelayanan air bersih belum sepenuhnya mencerminkan tanggung jawab pemerintah secara optimal. Hal ini terlihat dari belum meratanya distribusi air serta tidak stabilnya kontinuitas aliran air yang diterima masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan amanah dalam bentuk pelayanan publik masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur.

Dalam teori *Siyāsah Tanfidziyyah*, pemerintah merupakan pelaksana kebijakan (*executive authority*) yang bertanggung jawab mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui pelaksanaan peraturan secara efektif. Keberhasilan implementasi pelayanan publik tidak hanya diukur dari adanya regulasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memenuhi hak-hak masyarakat secara adil dan bertanggung jawab. Berdasarkan teori tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan air bersih oleh PDAM di Desa Hanau Brak belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip *Siyāsah Tanfidziyyah*.

Prinsip keadilan (*'adl*), ditemukan adanya ketimpangan dalam distribusi air. Penggunaan pompa oleh sebagian masyarakat menyebabkan aliran air tidak merata, sehingga sebagian warga memperoleh layanan yang lebih baik dibandingkan yang lain. Prinsip keadilan dalam Islam ditegaskan dalam firman Allah SWT. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ketimpangan distribusi air menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pelayanan.

Dari aspek *masalahah (kemaslahatan)*, pelayanan air bersih seharusnya memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan yang belum maksimal justru menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat, seperti keharusan membeli air dari sumber lain atau menggunakan alat bantu tambahan untuk memperoleh air. Konsep kemaslahatan sangat ditekankan, sebagaimana tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan kemudharatan (*jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*). Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan dalam pelayanan publik belum tercapai secara maksimal.

Dalam *maqashid al-syari'ah*, pemenuhan kebutuhan air bersih berkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), karena air merupakan kebutuhan pokok yang berpengaruh

terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup masyarakat. Pelayanan air bersih yang belum optimal dapat mengurangi terwujudnya tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan umum (*masalah 'ammah*).

Dari prinsip akuntabilitas dan profesionalitas, lambatnya penanganan terhadap permasalahan infrastruktur utama, seperti kebocoran jaringan pipa, mencerminkan belum optimalnya pengelolaan pelayanan publik. *Siyasah Tanfidziyyah*, pemerintah dituntut untuk menjalankan kebijakan secara profesional, responsif, dan bertanggung jawab dalam menjaga fasilitas publik yang menjadi hak masyarakat. Disimpulkan bahwa implementasi pelayanan air bersih oleh PDAM di Desa Hanau Brak belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyyah*. Ketidakesesuaian tersebut terutama terlihat pada aspek pelaksanaan kebijakan yang belum mampu mewujudkan nilai amanah, keadilan, kemaslahatan, serta profesionalitas secara optimal dalam pelayanan publik.

4. Upaya Perbaikan dan Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian, upaya perbaikan yang paling mendesak adalah pembenahan infrastruktur, khususnya jaringan pipa distribusi yang sudah tua dan mengalami kebocoran. Selain itu, diperlukan peningkatan sistem pengawasan dan responsivitas PDAM terhadap keluhan masyarakat, terutama untuk permasalahan yang berskala besar. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa serta meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik. Sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pelanggan serta mekanisme pengaduan yang jelas juga menjadi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, perbaikan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Optimalisasi pelayanan air bersih tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan religius dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya perbaikan pelayanan air bersih juga perlu diarahkan pada

penguatan sistem manajemen pelayanan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. PDAM sebagai penyedia layanan publik perlu memiliki pemetaan yang jelas terkait kondisi jaringan distribusi, tingkat kerusakan, serta wilayah yang mengalami gangguan pelayanan secara berulang. Dengan adanya basis data yang akurat, proses pengambilan keputusan dalam perbaikan infrastruktur dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif, sehingga tidak bersifat reaktif semata.

Di samping itu, penguatan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas pelayanan. Aparatur PDAM perlu dibekali dengan pelatihan teknis maupun manajerial agar mampu merespons permasalahan di lapangan secara cepat, tepat, dan profesional. Keterbatasan kemampuan teknis dalam menangani kerusakan jaringan utama dapat memperlambat proses perbaikan dan berdampak langsung terhadap ketidakpuasan masyarakat.

Partisipasi masyarakat juga perlu dioptimalkan sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial dalam pelayanan publik. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengawasi, memberikan masukan, serta mengevaluasi kinerja pelayanan air bersih. Tercipta hubungan yang lebih partisipatif antara pemerintah, PDAM, dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

Kerangka *Siyasah Tanfidziyyah*, penguatan aspek-aspek tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan amanah kekuasaan. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk menyediakan layanan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang diimplementasikan benar-benar memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Setiap bentuk perbaikan dalam pelayanan publik harus selalu diarahkan pada tercapainya prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral dalam penyelenggaraan pemerintahan (Maynaki *et al.*, 2025).

Perbaikan pelayanan air bersih di Desa Hanau Brak tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan implementasi nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik dalam perspektif hukum Islam. Hal ini sekaligus menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana prinsip *Siyasah Tanfidziyyah* telah diimplementasikan dalam praktik pelayanan publik di tingkat daerah.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik pada layanan air bersih oleh PDAM di Desa Hanau Brak belum berjalan secara optimal. Meskipun kualitas air yang disalurkan tergolong baik, namun dari aspek kuantitas dan kontinuitas distribusi masih mengalami berbagai kendala. Aliran air yang tidak stabil, rendahnya debit air, serta ketidakmerataan distribusi menjadi permasalahan utama yang dihadapi masyarakat.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh kondisi infrastruktur yang sudah tidak layak, terutama jaringan pipa yang mengalami kebocoran di berbagai titik. Apabila telah dilakukan pembaruan atau penggantian jaringan pipa, maka evaluasi perlu difokuskan pada efektivitas pengelolaan distribusi dan sistem operasional pelayanan untuk memastikan bahwa perbaikan infrastruktur benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, responsivitas PDAM terhadap permasalahan berskala besar juga masih belum maksimal, meskipun penanganan terhadap gangguan kecil relatif cepat. Mekanisme pengaduan yang belum terintegrasi dengan baik serta kurangnya sosialisasi turut memperkuat adanya kesenjangan antara standar pelayanan yang diatur dalam peraturan daerah dengan praktik di lapangan.

Jika ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, pelaksanaan pelayanan air bersih di Desa Hanau Brak belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan Islam, khususnya dalam aspek amanah, keadilan, dan kemaslahatan.

Ketidakmerataan distribusi air menunjukkan belum terpenuhinya prinsip keadilan, sementara belum optimalnya pelayanan mencerminkan kurang maksimalnya pelaksanaan amanah pemerintah. Selain itu, kondisi pelayanan yang belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, PDAM Kabupaten Pesawaran perlu melakukan pembenahan infrastruktur secara menyeluruh, khususnya pada jaringan pipa distribusi yang sudah tua dan mengalami kebocoran, agar distribusi air dapat berjalan lebih optimal dan merata. PDAM juga disarankan melakukan inspeksi dan pemeliharaan jaringan secara berkala serta menyusun skala prioritas perbaikan pada wilayah yang paling sering mengalami gangguan distribusi air.

Kedua, perlu adanya peningkatan responsivitas dan profesionalitas dalam penanganan keluhan masyarakat, terutama terhadap permasalahan yang berskala besar. PDAM juga diharapkan dapat memperkuat sistem pengaduan yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, perlu ditetapkan standar waktu penyelesaian (*service level*) terhadap setiap laporan masyarakat sehingga penanganan pengaduan dapat dilakukan secara lebih terukur dan akuntabel.

Ketiga, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa sebagai pihak yang dekat dengan masyarakat. Sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pelanggan juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami mekanisme pelayanan yang ada. Pemerintah daerah juga disarankan melakukan evaluasi kinerja PDAM secara berkala berdasarkan indikator pelayanan publik, seperti kontinuitas distribusi air, kualitas pelayanan, tingkat kepuasan pelanggan, dan kecepatan penanganan pengaduan.

Keempat, dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, pemerintah diharapkan mampu menjalankan pelayanan publik secara lebih adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan

masyarakat. Hal ini penting agar pelayanan air bersih tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kelima, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji pelayanan air bersih PDAM dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif maupun mixed methods sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kepuasan masyarakat, faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan, serta efektivitas implementasi kebijakan pelayanan publik di daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Agamar, Alya, Hervin Yoki Pradikta, dan Alan Yati. (2026). “Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah atas Implementasi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten OKU Selatan.” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 4 (4). <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i4.1396>
- Al Arif, M. Yasin, dan Panggih F. Paramadina. (2021). “Konstitusionalitas Perda Syari’ah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Vol. 1, No. 1. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8953/4436>
- Al-Qur’an al-Karim. *Surah An-Nisa (4): 58*.
- Aprelia, Refita, Agustina Nurhayati, Rudi Santoso, dan Rita Zaharah. (2023). “Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2. <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.21222>. (UIN Raden Intan Lampung).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Hasanah, R., & Handayani, R. (2025). *Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Tangerang: Analisis Implementasi Kebijakan Model George C. Edwards III*. PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies, 4(4). <https://doi.org/10.24036/publicness.v4i4.315>
- Hidayat, C. N., & Niagara, S. G. (2022). *Hubungan Wewenang antara Pemerintah Pusat dengan Wewenang Pemerintah Daerah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Berdasarkan Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2). <https://doi.org/10.32493/rjih.v5i2.27608>

- Hutasuhut, U. M., Zuhraini, Z., Hermanto, A., & Triono, T. (2022). *Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah*. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 2(2). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>
- Marisa, Dea, Frenki Frenki, dan Nurasari Nurasari. (2026). "The Role of the Pesawaran Regency Election Supervisory Board (Bawaslu) in Overseeing the Neutrality of Civil Servants (ASN) in the 2024 Regional Head Election from the Perspective of Siyasa Tanfidziyyah." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1: 13–30.
- Maynaki, Ricky, Frenki, and Dani Amran Hakim. (2025). "Tinjauan Siyasa Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Smart Village (Studi di Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 11. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.5000>
- Saldaña, J. (2021). *The Coding Manual for Qualitative Researchers* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (2021). (Edisi Revisi, Cetakan ke-40). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pratama, Rian, dan Ratna Dewi. 2022. "Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik." *Jurnal Administrasi Publik* 8 (2): 145–156.
- Putri, E. D., Zurfi, A., Setiawati, E., & Lisafitri, Y. (2022). Keterkaitan sistem penyediaan air bersih dan angka penyakit diare di daerah pesisir Kelurahan Kangkung. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(1), 158–167. <https://doi.org/10.14710/jil.20.1.158-167>
- Rajagukguk, J., Tobing, A. L., & Sibarani, E. (2022). Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam meningkatkan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Medan Timur. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(11), 4807–4812. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i11.1129>
- Romadon, Gilang, Novendra Erwin, and Anugerah Happyndo. (2025). "Analisis Pelayanan Prima PDAM Terhadap Kepuasan

- Pelanggan Melalui Pelayanan yang Efektif.” *Sroedja Journal*, Vol. 2 No. 2. <https://doi.org/10.70079/srodja.v2i2.126>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surya, Mulvi, Rano Rano, Aminudin Aminudin, Asep Muhamad M, dan Ditya Sri Rahmawati. (2026). “Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik terhadap Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut.” *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik* 17 (1). <https://doi.org/10.36624/jpkp.v17i1.294>
- Syahrian, Syahrian. (2023). “Pengaruh Kualitas Pelayanan Air Bersih terhadap Kepuasan Masyarakat pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara.” *Al-Iidara Balad* 5, no. 1: 31–35. <https://doi.org/10.36658/aliidarabalad.5.1.52>



L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1 Analisis Metode Penelitian

Analisis Metode Penelitian

Aspek	Detail
Lokasi Penelitian	Desa Hanau Brak. Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran
Metode Penelitian	Penelitian Kualitatif melalui pendekatan deskriptif.
Pengumpulan Data	Wawancara mendalam dengan aparatatur perangkat kelurahan, serta masyarakat yang terdampak.
Teknik Analisis Data	Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi di lapangan dan selanjutnya di analisis menggunakan perspektif <i>siyasaḥ tanfidziyyah</i>
Subjek Penelitian	Perangkat desa dan masyarakat desa hanau brak yang menggunakan layanan air bersih PDAM.

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukrame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1901/Un.16/DS/PP.009/04/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

29 April 2026

Kepada Yth.
Kepala Desa Hanau Brak Kecamatan Padang Cermin
Kabupaten Pesawaran

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Desa Hanau Brak Kecamatan Padang Cermin kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama	: Zahrotun Annisa
NPM	: 2221020438
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian	: TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN PUBLIK PADA LAYANAN AIR BERSIH OLEH PDAM (Studi di Desa Hanau Brak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)
Lokasi Penelitian	: Desa Hanau Brak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran
Penanggung jawab	: Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Efa Rodiah Nur

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Zahrotun Annisa

Lampiran 3 Surat Balasan Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
KECAMATAN PADANG CERMIN
DESA HANAU BERAK**

Jl. Raya Way Ratai Desa Hanau Berak, Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Kode Pos 35451

Nomor : 140/001/VII.05.07/V/2026
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian

Hanau Berak, 11 Mei 2026

Kepada Yth:

DEKAN FAKULTAS SYARIAH

DI

BANDAR LAMPUNG

Nama/NPM : ZAHROTUN ANNISA / 2221020438
Semester/Prodi : VIII(Delapan) /Hukum Tata Negara (Siyash Syar'iyah)
Judul Penelitian : TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 11
TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN PUBLIK PADA LAYANAN
AIR BERSIH OLEH PDAM (Studi Di Desa Hanau Berak
Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)

Dengan Ini Saya Selaku Kepala Desa Hanau Berak Mengizinkan Kepada Nama Mahasiswa Diatas Untuk Melakukan Kegiatan Penelitian Di Desa Hanau Berak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

Demikian Surat ini kami buat, Atas perhatiannya kami ucapkan Terima kasih.

Kepala Desa Hanau Berak

AHMAD ALAMSYAH

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara



Lampiran 5 Letter of Acceptance (LoA)



KLINIK HUKUM REWANG RENCANG
Jalan Borobudur Agung No 26, Kota Malang
Tlp: 087777844417 | Email: jhl@rewangrencang.com
www.publikasi.rewangrencang.com

SURAT KETERANGAN PUBLIKASI

No.05.06.01/S.Ket/JHLG/VI/2026

Berdasarkan hasil penilaian oleh Mitra Bestari independen, dengan ini kami, Jurnal Hukum Lex Generalis di bawah naungan CV Rewang Rencang menyatakan bahwa naskah dari:

Nama Penulis : Zahrotun Annisa, Zuhraeni, Nurasari.
Institusi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Judul Naskah : *"Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Publik Pada Layanan Air Bersih Oleh Pdam (Studi di Desa Hanau Brak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)."*

dinyatakan **memenuhi** Standar Kelayakan Publikasi Naskah (SKPN) dan akan terbit pada Jurnal Hukum Lex Generalis Volume 7 Nomor 2 (2026).

Demikian Surat Keterangan Publikasi dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Malang, 5 Juni 2026

Direktur Utama
CV Rewang Rencang

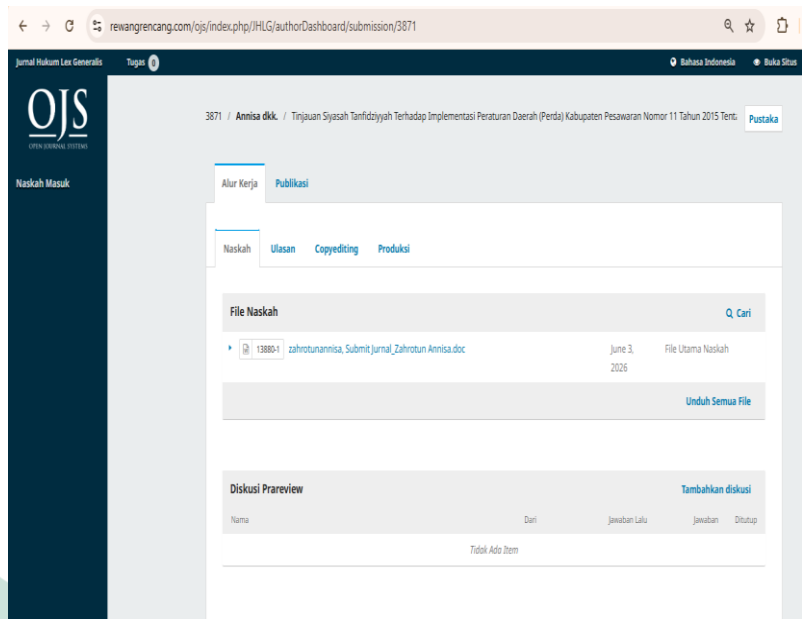

Rewang Rencang
Ivan Drago, S.H.

Supervisor Jurnal Hukum
Lex Generalis

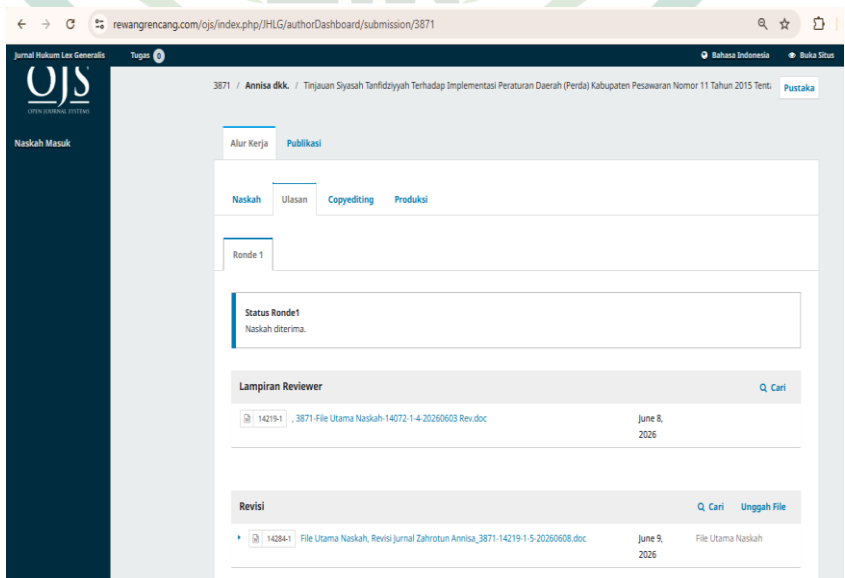

Fazal Akmal M., S.H., M.H.

Lampiran 6 Bukti Korespondensi

Submit



Lampiran Reviewer



Upload Revisi

rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/authorDashboard/submission/3871

Jurnal Hukum Lex Generalis
OJS
OPEN JOURNAL SYSTEMS

Naskah Masuk

3871 / Annisa dkk. / Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 Tentang

Alur Kerja Publikasi

Naskah Ulasan Copyediting Produksi

Ronde 1

Status Ronde1
Naskah diterima.

Lampiran Reviewer

14219-1	3871-File Utama Naskah-14072-1-4-20260603 Rev.doc	June 8, 2026

Revisi

14284-1	File Utama Naskah, Revisi Jurnal Zahrotun Annisa_3871-14219-1-5-20260608.doc	June 9, 2026

Copyediting

rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/authorDashboard/submission/3871

Jurnal Hukum Lex Generalis
OJS
OPEN JOURNAL SYSTEMS

Naskah Masuk

3871 / Annisa dkk. / Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 Tentang

Alur Kerja Publikasi

Naskah Ulasan Copyediting Produksi

Diskusi Copyediting

Nama	Dari	Jawaban Lalu	Jawaban	Ditutup
Tidak Ada Item				

Copyedit

15528-1	File Utama Naskah, Revisi Jurnal Zahrotun Annisa_3871-14219-1-5-20260608.doc	July 5, 2026

Publikasi

← → ↻ rewangrencang.com/ojs/index.php/IHLG/authorDashboard/submission/3871 🔍 ☆ 📄

Jurnal Hukum Lex Generalis Tugas 1 Bahasa Indonesia Buka Situs

OJS
OPEN JOURNAL SYSTEMS

Naskah Masuk

3871 / Annisa dkk. / Tinjauan Siyash Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pustaka

Alur Kerja Publikasi

Status: Diterbitkan

Versi ini telah diterbitkan dan tidak dapat disunting.

Judul & Abstrak English Bahasa Indonesia

Kontributor

Metadata

Galley

Prefiks
Contoh: A. The

Judul
✓ Tinjauan Siyash Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun

Subjudul
✓ Studi Di Desa Hanau Brak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

Abstrak
B I x' x₂

← → ↻ rewangrencang.com/ojs/index.php/IHLG/submissions 🔍 ☆ 📄

Jurnal Hukum Lex Generalis Tugas 1 Bahasa Indonesia Buka Situs

OJS
OPEN JOURNAL SYSTEMS

Naskah Masuk

Antriaku Arsip 1 Bantuan

Naskah Yang Diarsipkan 🔍 Cari Naskah Baru

3871 Annisa dkk. Diterbitkan 1

Tinjauan Siyash Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Publik Pada Layanan Air Bersih Oleh Pdarm: Studi Di Desa Hanau Brak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

Platform & workflow by
OJS / PKP

Lampiran 7 Link Publikasi Jurnal dan Bukti Indeksasi Jurnal

<https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/3871>

← → ↻ 🌐 rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/3871

Beranda / Anisip / Vol 7 No 2 (2026): Tema Hukum Islam / Articles

Tinjauan Siyash Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Publik Pada Layanan Air Bersih Oleh Pdam

Studi Di Desa Hanau Brak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

<https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i2.3871>

Full PDF

Terbitan

Vol 7 No 2 (2026): Tema Hukum Islam

Diterbitkan: Jul 5, 2026

Kata Kunci:
Pelayanan Publik, PDAM, Perda Pesawaran, Siyash Tanfidziyyah, Air Bersih Public Service, PDAM, Pesawaran Regional Regulation, Siyash Tanfidziyyah, Clean Water

Zahrotun Annisa
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Zuhraini
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Nurasari
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik pada pelayanan air bersih oleh PDAM di Desa Hanau Brak, Kecamatan Padang Cermin, serta meninjaunya dalam perspektif Siyash Tanfidziyyah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan air bersih belum optimal akibat infrastruktur jaringan pipa yang sudah tua dan mengalami kebocoran, distribusi air yang tidak

 SINTA

Journals

Sort by

Impact

Search journals

Search...

Filter



JURNAL HUKUM LEX GENERALIS

✓

Google Scholar Website Editor URL

CV Rewang Rencang

P-ISSN : | E-ISSN : 27664075

S4 Accredited Garuda Indexed

Lampiran 8 Surat Keterangan Cek Sitasi

RUMAH JURNAL FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: dan

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Zakhrun Annisa

NPM : 2221020438

Prodi : Hukum Tata Negara

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (full note, with ibid)</i> .	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung.	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 10 Juni 2026

Rumah Jurnal

Ketua



Prof. Dr. H. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001



- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi ttd pada QR code.

Lampiran 9 Surat Keterangan Bebas Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703278

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 2438/Un.16 /P1 /KT/VI /2026

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP : 197005121998032002
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

**TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN PUBLIK PADA
LAYANAN AIR BERSIH OLEH PDAM
(Studi di Desa Hanau Brak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
ZAHROTUN ANNISA	2221020438	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 15% dan dinyatakan *Lulus* dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 15 Juni 2026

Kepala UPT Perpustakaan


Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
197005121998032002

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli UPT Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Karya Ilmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di UPT Perpustakaan.

ADEN INTAN LIBRARY**INJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP
MPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN P...**

SKRIPSI

Document Detailsmission ID
oid::3618:142573876

24 Pages

mission Date
in 2026, 13:30 GMT+7

4,478 Words

mload Date
in 2026, 10:47 GMT+7

31,244 Characters

Name
ROTUN ANNISA.docxSize
1.8 KB

15% Overall Similarity

the combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

- 2% Internet sources
- 1% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 12% Internet sources
 7% Publications
 10% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
asianpublisher.id		1%
2	Internet	
peraturan.bpk.go.id		<1%
3	Internet	
www.suaramuhammadiyah.id		<1%
4	Student papers	
UIN Raden Intan Lampung on 2023-08-13		<1%
5	Internet	
repository.uinfasbengkulu.ac.id		<1%
6	Internet	
journal.appisi.or.id		<1%
7	Publication	
Cahyani Rika Prawesty, Sri Wahyuni. "Optimalisasi Alur Pelayanan Administrasi K...		<1%
8	Student papers	
UIN Sunan Ampel Surabaya on 2026-02-13		<1%
9	Internet	
journal.isitasik.ac.id		<1%
10	Student papers	
Universitas Papua on 2025-11-05		<1%
11	Publication	
Khaira. "Implementasi Pembelajaran Praktik Tata Boga dalam Meningkatkan ...		<1%

Lampiran 10 Blanko Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl.Letkol H. Endri Sutarmin Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721)703289

BLANKO KONSULTASI

Nama : Zahrotun Annisa
Npm : 2221020438
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Pembimbing I : Dr. Zuhraeni, S.H. M.H
Pembimbing II : Nurasari, S.H., M.H
Judul Artikel : Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Publik Pada Layanan Air Bersih Oleh Pdam (Studi Di Desa Hanau Brak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)

No	Tanggal	Keterangan	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	1 Oktober 2025	Pengajuan Judul		
2	19 Januari 2026	Acc Proposal Untuk Seminar		
3	13 April 2026	Bimbingan Proposal Bab I oleh Pembimbing II		
4	13 April 2026	Acc Proposal Bab I oleh Pembimbing II		
5	20 April 2026	Acc Proposal Bab I oleh Pembimbing I		

Biografi Penulis



Penulis Penulis bernama Zahrotun Annisa, lahir di Gebang pada tanggal 13 November 2004, penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Orang tua penulis bernama Rukmansyah dan Salamah. Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. SDN 5 Teluk Pandan, pada 2010-2016
2. SMPN 25 Pesawaran, pada tahun 2016-2019
3. SMK Jakarta Timur 1, pada tahun 2019-2022
4. Pada tahun 2022 penulis melanjutkan

pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah'ah.

Selama menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah turut menjadi salah satu mahasiswa yang berkembang di bidang akademik maupun non akademik.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1448 H/2026 M**

